

URAIAN TEDDY RUSDY
DALAM ACARA PELUNCURAN BUKU PANCASILA
NEGARA PARIPURNA : HISTORISTAS , RASIONALITAS , dan
AKTUALITAS
TANGGAL 19 MEI 2011

Setelah lebih sepuluh tahun memasuki Era Reformasi yang sangat diharapkan menjadi pintu gerbang mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai amanat bernegara , ternyata malah menjadi awal sebuah ketidakpastian. Semangat mengubah segalanya , dari keadaan masa lalu, justru telah membawa Bangsa ini meninggalkan dan melupakan cita-cita bersama ketika para Pendiri Bangsa membentuk sebuah Negara.

Salah satu akar masalah kita saat ini adalah hampir hilangnya rasa kebangsaan , tanggungjawab sosial , sikap saling menghargai dan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri manusia Indonesia , yang Pancasilais.

Korupsi dan ketidakadilan merajalela , kesenggangan disegenap sendi kehidupan semakin lebar sampai kepada suatu titik yang memaksa kita bertanya :

Inikah yang kita kehendaki ?

Pasti bukan ! Lebih parahnya karena kita tidak tahu lagi mau dibawa kemana Bangsa ini ?

Kita seperti kehilangan dasar untuk pijakan , arah dan pegangan sebagai tuntunan , “something is missing” !

Sesuatu yang paling berharga nyaris telah hilang , yaitu dasar dan falsafah ketika Negara ini dibentuk dan dicita-citakan oleh Para Pendiri Bangsa.

Hari ni kita bersama-sama hadir untuk menyimak dan menyikapi karya Penulis muda Intelektual tokoh muda YUDI LATIF yang menyodorkan suatu barang berharga yang “missing” tadi. “Negara Paripurna : Historistas , Rasionalitas , dan Aktualitas Pancasila”

Bersama-sama pula kita kuliti sampai ketemu inti masalahnya , dimana :

1. Bapak Ananda B. Kusuma sebagai Sejarawan Konstitusi
2. Ibu Eva Kusuma Sundari anggota DPR yang banyak menggeluti “Pancasila”
3. Bapak Peter Kasenda , sejarawan yang sangat memahami pikiran Bung Karno.
4. Dan saya sebagai Purnawirawan ABRI yang “concern” atas perjalanan Bangsa kita.

Secara historis Penulis melalui Riset mendalam dengan lugas dan praktis , mantik dan runtut dan intelektual ilmiah telah mampu menelusuri perjalanan sejarah Bangsa , dengan berbagai pandangan dan aliran Para Pendiri Bangsa sampai dengan formulasi akhir sebagai kristalisasi dari semua pandangan dan harapan untuk apa kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

- Pandangan Soekarno : dengan semangat Nasionalismenya
- Pandangan Bung Hatta : dengan semangat sosio demokrasi dan demokrasi ekonomi
- Pandangan H.O.S. Tjokroaminoto : dengan semangat Sosialisme Islam
- Pandangan Tan Malaka dengan paham Komunisme
- Profesor Supomo seorang idealis ahli hukum
- Sutan Sjahrir sebagai tokoh termuda dan liberal

Beserta anggota-anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan berusaha mencapai kata sepakat untuk menyusun Falsafah dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia.

Para Pendiri Bangsa tersebut telah mewakili semua golongan (etnis , agama , intelektual) bersama-sama menggali apa sebetulnya “barang berharga” yang akan menjadi acuan bersama dalam kehidupan bernegara. Acuan mana juga akan menjadi jati diri rakyat dan bangsa ditengah-tengah Bangsa lainnya di dunia.

Mereka secara tepat “merasakan” bahwa factor-faktor geo strategislah yang membentuk ciri-ciri suatu Bangsa , yakni :

1. Faktor geografi , wilayah Nusantara terdiri dari ribuan pulau dengan laut dan selatnya sebagai penghubung kesatuan.
2. Faktor demografi , wilayah Nusantara terdiri dari berbagai ragam suku dan agama.
3. Posisi silang diantara dua Samudera dan dua Benua yang menempatkan wilayah Nusantara pada posisi silang arus komunikasi budaya dan tata nilai (value system) Utara-Selatan dan Barat-Timur.

Menyadari kedudukan ketiga faktor tersebut , menempatkan wilayah dan Bangsa Indonesia sebagai titik temu arus kebudayaan dan peradaban , yang membentuk ciri-ciri manusia yang :

- Toleran mudah paham dan maklum.
- Adaptif mudah menerima unsur-unsur yang positif.

Tentu saya , posisi tersebut juga membuka kerawanan-kerawanan dari suatu masyarakat yang terbuka (open society) , secara singkat Penulis mengatakan wilayah Nusantara sebagai kualifikasi yang menggodok aneka ragam “basic ingredient” (unsur dan elemen bahan baku berbagai tata nilai dan budaya , menjadi suatu adonan khas yang menjadi SINTESA produk pertemuan tersebut.

Di dalam upaya menggali dan menggali , malam sebelum disajikannya di forum BPUPK Bung Karno “sakral”nya beliau berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan petunjuk untuk menggali dan tetap menggali “barang berharga” yang telah ada namun terpendam dalam Bumi Indonesia untuk mendapatkan “barang berharga” untuk dipakai dasar Negara Indonesia Merdeka yang akan datang. Ditemukanlah Pancasila layaknya menemukan kembali ratna muti manikam yang nyaris hilang , bisa diketemukan kembali dan disetujui semuanya.

Selama proses penggalian sila-sila Pancasila tersebut , sebagaimana layaknya sikap intelektual demokratis hadir permasalahan Agama dan Kebangsaan , prinsip dan kaidah mana yang akan ditempuh ; yang kemudian disepakati dengan rumusan : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur , supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas...”

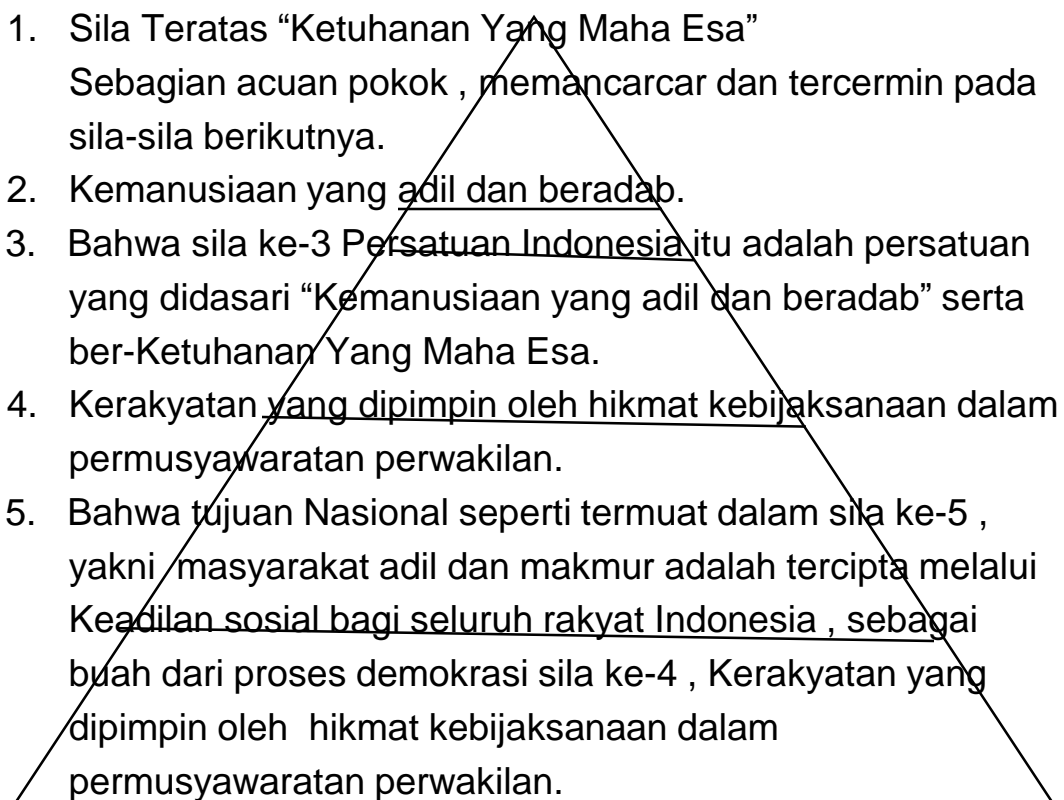
- Pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” Konstitusi Republik Indonesia berlindung kepada Allah , dan dengan itu maka syarat Agama dipenuhi. Prinsip hubungan antara agama dan negara telah disepakati.
- Penulis telah mampu secara runtut , gamblang dan jelas telah mampu menghadirkan proses sejarah Konseptualisasi Pancasila yang melintasi rangkaian panjang fase “pembuahan” , fase “perumusan” dan fase “pengesahan” sejak tahun 1920 s/d 18 Agustus 1945.

Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Checks Paper “lepas” mengurai Hirarki Piramidal

- Saya akan masuk lebih dalam memahami sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ; tetapi melalui wilayah profesi saya sebagai purnawirawan ABRI.

HIRARKI PIRAMIDAL

- 
1. Sila Teratas “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Sebagian acuan pokok , memancarcar dan tercermin pada sila-sila berikutnya.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Bahwa sila ke-3 Persatuan Indonesia itu adalah persatuan yang didasari “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 5. Bahwa tujuan Nasional seperti termuat dalam sila ke-5 , yakni masyarakat adil dan makmur adalah tercipta melalui Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia , sebagai buah dari proses demokrasi sila ke-4 , Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Artinya sila yang di atas merupakan acuan pokok dan esensi dari sila-sila berikutnya , artinya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjiwai sehingga tercermin dan memancar pada sila-sila berikutnya. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai pencerminan dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sila ke-3 “Persatuan Indonesia itu adalah persatuan yang didasari “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Bahwa tujuan Nasional seperti termuat dalam sila ke-5 , yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tercipta melalui proses demokrasi sila ke-4 yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dicapai melalui “Persatuan Indonesia” yang dicapai melalui “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang kesemuanya itu berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

ISLAM dan NKRI

- Untuk melaksanakan fungsinya ABRI (TNI/POLRI) sebagai alat penanggungjawab pertahanan dan keamanan , pertama-tama harus mampu mengurai dan menjabarkan hakekat ancaman yang dipersepsikan. Intelijen sebagai mata dan telinga pertahanan dan keamanan , harus mampu mendeteksi hakekat ancaman tersebut yang biasa diurai sebagai Tantangan , Gangguan , Hambatan dan Ancaman (TGHA). Kami juga melihatnya secara ilmiah sebagai “spektrum ancaman” dari yang paling “subtle” (samar) / dari dalam tubuh sendiri sampai dengan yang paling “brutal” , perang terbuka , perang Revolusioner.

Tugas Intel adalah penginderaan dini terhadap TGHA tersebut , idealnya se-dini mungkin sebelum membesar , mewujud dan bergerak. Dengan deteksi dini dapat dicegah , ditangkal (to deter) dan diatasi dengan Soft Power tanpa resiko biaya dan korban yang besar. Untuk mampu mendeteksi dini berarti kita sudah mengamati tindak tanduk , alur pikiran dan niat untuk berbuat. Idealnya proses ini tidak dilakukan oleh Intel ABRI tetapi dari diri individu masing-masing (inner selection process) dengan memahami the “do’s” dan “don’t” dengan sendirinya diawali , didahului dan dibantu dengan melalui proses edukasi, pencerahan dan indoktrinasi.

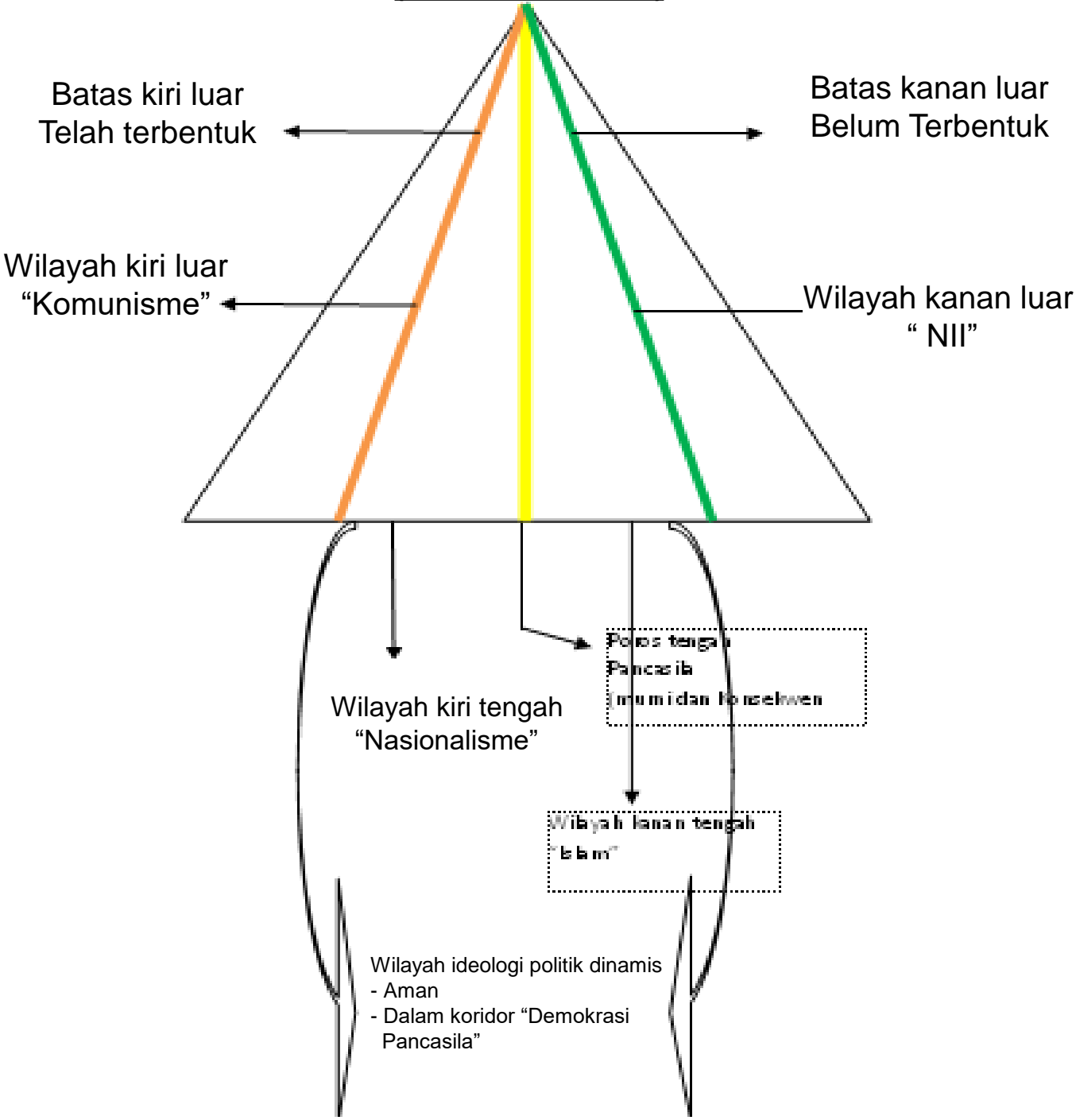
Setelah peristiwa Tanjung Priok , kasus Talangsari Lampung , pembajakan Woyla Kelompok IMRON , ABRI dituduh menyudutkan umat Islam , apalagi Panglimanya waktu itu Jenderal L.B. Moerdani beragama Katolik. Keadaan tersebut mendorong ABRI bersama Bapak ALI SAID , SH dan jajaran Kejaksaan Agung untuk bersafari berkunjung ke Pusat dan kantong umat Islam di Pesantren-Pesantren. Pada kesempatan mana kami jelaskan tentang 4 (empat) pilar Negara dan Bangsa kita , Pancasila , UUD '45 , NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bahwa yang ditumpas adalah gerakan DI/TII/NII yang kita kategorikan sebagai “gerakan Ekstrim Kanan” , suatu gerakan makar dari sekelompok yang menggunakan ajaran Islam untuk keluar dari 4 (empat) pilar harga mati tersebut.

Kita jelaskan bahwa proses kelahiran Bangsa Indonesia membawa serta 3 (tiga) kelompok ideologi besar , yakni : nasionalisme (kebangsaan) , agama dan komunisme.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara, Para Pendiri Bangsa sepakat bahwa dengan mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila I merupakan pengakuan bahwa kita adalah bangsa yang beragama , tetapi juga bukan negara sekuler atau negara Agama , proses mana digambarkan dengan jelas dan lugas pada buku Yudi Latif.

TEORI PENDULUM (IDEOLOGI POLITIK)



* Semasa ORBA :

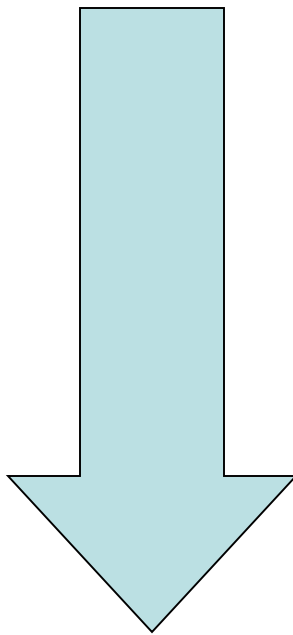
- Poros Tengah = Golkar
- Kiri Tengah = PNI/PDI
- Kanan Tengah = PPP

Partai Komunis Indonesia , pada tahun 1948 dan 1965 telah berkhianat kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan , kepada 4 (empat) pilar bangsa yang telah dibakukan. Setelah tumpasnya gerakan PKI , maka Negara dan Bangsa telah menetapkan batasan-batasan sehingga paham Komunisme tidak boleh hidup di Negara Pancasila.

Mengenai ideologi Komunisme , di mata masyarakat sudah gamblang batasan-batasannya , sudah terbentuk “inner selection process” , dan rakyat tahu apa akibat-akibatnya kalau dilanggar , sehingga rakyat tidak berani menganut paham Komunisme , bukan hanya melanggar dengan tindakan, bahkan berpikir untuk menjadi Komunis pun tidak akan terlontar. Artinya didalam pendulum politik Indonesia , batasan ekstrim kiri telah terbentuk.

Sebaliknya gerakan DI/TII/NII termasuk mosus-modus terornya walaupun telah berulang kali muncul dan dihancurkan , namun batas wilayah ekstrim kanan dari gerakan pendulum ekstrim kanan belum terbentuk seperti halnya batas gerakan pendulum politik ekstrim kiri. Berarti kita akan tetap harus selalu siap menghadapi bahaya Ekstrim Kanan. Sehingga masih ada dan masih akan ada sekelompok masyarakat yang mengidealkan , berpikir dan bertindak untuk membangun NII.

- Sungguh suatu IRONI , apabila pada saat era ORBA Operasi Intel , Operasi Teritorial dan Operasi Tempur menghantam bahaya Ekstrim Kanan , ABRI selalu dipermasalahkan dan dipersalahkan sebagai tindakan anti agama Islam (Peristiwa Tanjung Priok , Peristiwa Talangsari Lampung , Pembajakan pesawat “Woyla”).
- Hari ini pendapat rakyat , intelektual , dunia pendidikan telah mengatakan bahwa NII adalah tindakan makar, Pemerintah cq TNI/POLRI mengatakan belum menjadi ancaman nyata yang masif. Kalau mereka ditunggu menjadi massa yang kuat dan melakukan teror dan gerakan fisik untuk makar , maka biaya , waktu dan korbannya akan besar dan terpaksa menggunakan “hard power”.



Paper Kliping

MEDIA INDONESIA
7 Mei 2011

Lemhannas Nilai NII Langgar UUD 1945

SEMENTARA pemerintah menilai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) belum melanggar kedaulatan negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan NII sudah menabrak empat pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kami minta aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi menindak gerakan NII," kata Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, NII telah mengganggu pola pikir seseorang yang tidak sesuai dengan koridor empat kesepakatan nasional sehingga menjadi ancaman keutuhan NKRI.

Berdasarkan laporan dari beberapa perguruan tinggi, sejumlah mahasiswa yang menjadi korban memiliki indeks prestasi yang tinggi sebelum direkrut NII. Namun sayang, setelah masuk gerakan NII, indeks prestasi mereka turun drastis.

Kami minta aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi menindak gerakan NII."

Jangan Biarkan Radikalisme

Presiden: Terorisme dan Kekerasan Horizontal Jadi Ancaman Serius

JAKARTA, KOMPAS — Bangsa Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius terkait dengan terorisme, kekerasan horizontal, dan radikalisasi yang terus terjadi di sejumlah tempat. Jika tak ditanggulangi secara serius, kondisi ini bisa berdampak pada harmoni kehidupan bangsa ke depan.

Peringatan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia yang menghadiri Majelis Permusyawaratan Pembangsaan Nasional di Jakarta, Kamis (28/4).
"Rasa aman masyarakat terancam. Jangan dilupakan. Semua bertanggung jawab dan bertugas menanggulangi ancaman itu," katanya.



DK 0009 5239

BACA JUGA HAL 2, 6

Presiden mengakhiri semua jilatan pemerintahan melakukan pencegahan, sedini mungkin untuk menanggulangi ancaman terorisme, kekerasan horizontal, dan radikalisme itu. Masalah ini tak mungkin ditangani polisi dan penegak hukum semata. "Saya berharap ancaman ini ditanggulangi secara serius," ungkapnya.

Di sisi lain Presiden melihat adanya gerakan radikalisasi

10 Rekomendasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme

1. Mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pusat penanganan yang integratif masalah radikalisasi dan kontra-radikalisasi.
2. Amendemen Undang-Undang Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003, terutama terkait kriminalisasi atau perluasan obyek hukum dan perbaikan mekanisme hukum acara.
3. Optimalisasi metode konseling dengan memanfaatkan teroris yang sudah bertobat dalam upaya desradikalisasi para calon teroris oleh BNPT dan instansi terkait.
4. Meningkatkan koordinasi yang solid antarpenghak hukum guna mencegah virus yang mematikan terkait dengan narapidana terorisme.
5. Mendukung Kementerian Pendidikan Nasional membakukan lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai tempat pencegahan radikalisme.
6. TNI dan Polri perlu waspada terhadap modus baru teror meski tetap tidak lengah dengan modus konvensional.
7. Mendukung Polri mengedepankan pendekatan hukum dalam memberantas terorisme.
8. Meminta peran serta instansi-instansi, seperti Kementerian Agama serta Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mengurangi beban Polri.
9. Mendukung studi radikalisme dan terorisme interdisipliner yang akademis guna mendukung pembuatan kebijakan dan langkah operasional BNPT dan instansi terkait lain.
10. Pemerintah, media massa, dan tokoh masyarakat menghindari tindakan yang bernada "memaklumi" atau "memaafkan" radikalisme dan terorisme.

Penangkalan Pelaku Terorisme Berbasis Hukum dan Dam Seseorang

- Merendang, Kutaijaya, Bonda Aceh (21/4): 4 orang
- Kampung Jembatan, Cakung, Jakarta Timur: 1 orang
- Rawasari, Pondok Kopi, Jakarta Timur: 5 orang
- Jalan Pasanggrahan, Ciputat Timur (21/4): 1 orang
- Harapan Indah, Bekasi (21/4): 1 orang
- Perumnas Klender, Jakarta Timur (21/4): 3 orang
- Kecamatan Mekar Sari, Jakarta Timur (21/4): 1 orang
- Batutapak, Cidolog, Bogor (21/4): 1 orang

(Bersambung ke hal 15 kol 1-5)

Sumber: Simposium Nasional "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme", 27-28 Juni 2010, dan berita-berita "Kompas"

Sultan: NKRI Adalah Harga Mati PNS yang Masuk NII Khianati NKRI

[JAKARTA] Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mengatakan, dalam jajaran birokrasi DIY, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Karena itu, jika ada pegawai negeri sipil (PNS) di DIY yang terindikasi sebagai anggota NII, perlu mendapat *treatment* khusus.

Meski diakui Sultan bahwa indikasi itu belum muncul, namun sumpah jabatan dan pengabdian PNS harus menjadi landasan. Hal itu dikemukakan Sultan menanggapi pernyataan Gubernur Banten, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, yang mengatakan bahwa PNS yang masuk NII adalah merupakan hak asasi (SP, Jumat, 29/4).

Sementara itu, Presiden WCRP (World Conference of Religions for Peace) Dr (HC) KH Hasyim Muzadi mengatakan, sebagai PNS, tentunya terikat pada aturan perundang-undangan yang mengharuskan PNS adalah warga NKRI. Sebagai warga NKRI, harus mengagumi dan menghormati lambang-lambang negara, ter-

masuk ideologi Pancasila dan lagu *Indonesia Raya*.

"Jika mereka berstatus PNS, kemudian menjadi warga Negara Islam Indonesia (NII) yang mengharamkan NKRI beserta atribut atau lambang-lambang negaranya, itu sama sekali bukan sebagai hak asasi, tetapi sudah melakukan pengkhianatan terhadap NKRI," ujar Kiai Hasyim.

Kalau masuk PNS, tidak mungkin jadi negara NII. "Anuran hukumnya memang tidak memungkinkan. Mungkin gubernurnya (Gubernur Banten, Red) kesleo lidah," ujarnya.

Sementara itu, Prof HM Mas'ud Said PhD, pakar pemerintahan dan otonomi daerah dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berpendapat, sesuai ketentuan pokok PNS, tidak memberikan peluang kepada seseorang PNS untuk "membebaskan" dirinya mengukui ideologi lain, termasuk NII, selain ideologi NKRI, Pancasila. Pada PP No 30/1980 tentang Disiplin PNS ada 26 kewajiban dan 18 larangan.

Ketua Program ACICIS (Australian Consortium for In-

Country Indonesia Studies) UMM itu mengatakan, hal itu juga diatur dalam beberapa ketentuan lainnya yang menyangkut PNS, di antaranya UU RI Nomor 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; PP Nomor 13/2002 tentang Pengangkatan PNS.

Dari 26 kewajiban PNS sesuai PP Nomor 30/1980 tentang Disiplin PNS pada Pasal 2 secara tegas menyebutkan beberapa di antaranya; *Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah (RI)*.

Prof Dr Sutaryo, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, selaku Tim Perumus Sarasahan Nasional "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia" menyatakan, PNS sebagai alat negara harus sejalan dengan para pendiri bangsa, yang telah sepakat dengan pilihan bahwa negara yang hendak dibangun merupakan negara hukum yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 45.

Sebab, PNS sebagai gambar pemerintahan secara riil di masyarakat seharusnya bisa men-

jadi *leader*. "Jika NII menjadi subur di dalam tubuh birokrat, jelas akan membawa dampak yang signifikan," katanya.

Diburu Polisi

Sementara itu, Polresta Malang memburu dua mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, yang diduga merukut sejumlah mahasiswa di Universitas Negeri Malang dan UMM sebagai anggota NII. Keterlibatan kedua mahasiswa itu, menurut Pembantu Rektor III UNS, Dwi Triyanto, diketahui setelah beberapa waktu lalu aparat kepolisian Malang datang ke kampus itu meminta data kedua mahasiswa tersebut. "Kami masih mengidentifikasi data kedua mahasiswa FKIP itu," katanya tanpa menyebut nama kedua mahasiswa tersebut.

Selain itu, Dwi mengatakan, sedikitnya lima mahasiswa UNS yang diduga terkait NII. Salah satunya adalah Eris Setiawan mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP, yang menurut Dwi sudah ditangkap polisi. Dua mahasiswa dari program studi Pendidikan Akuntansi sempat saat ini masih menghilang.

Di tempat terpisah, Kaprores Jombang AKBPP Marjuki mengatakan, para pelaku kasus "cuci otak" terhadap sejumlah pelajar di Jombang diduga keras berstatus mahasiswa dari Kota Malang. Hingga kini aparatnya masih menadalam kasus tersebut.

Sementara itu, Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melimpahkan kasus penipuan berkedok agama, yang dialami empat mahasiswanya ke Poltabes Surabaya. Menurut Sekretaris Rektorat Unair, Hadi Subhan, keempat mahasiswa tersebut sudah kembali ke kampus.

Dari Denpasar dilaporkan, Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Hadiatmoko optimis kalau Bali bebas dari aliran NII. "Kami sudah antispasi bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Bali," tegasnya.

Gubernur Bali, Made Mangu Pastika berharap, masyarakat tetap waspada terhadap gerakan tersebut. "Gerakan ini sudah lama ada dan laten," tegas Gubernur Pastika, yang juga mantan Kapolda Bali itu. [152/070/IMR/143/137]

Hasil Amendemen UUD Menyimpang

SP 7 Mei 2011

[JAKARTA] Kalangan akademisi menilai, UUD 1945 hasil empat kali amendemen yang dilakukan dalam kurun 1999-2002 menyimpang dari semangat Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya, mereka sepakat dengan pandangan purnawirawan TNI AD yang menghendaki kaji ulang terhadap materi UUD 1945 yang berlaku saat ini. Dari kajian itu, selanjutnya diputuskan perlunya kembali mengamendemen UUD, untuk diselaraskan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 serta perkembangan kehidupan politik dan demokrasi masyarakat.

Demikian rangkuman pandangan Direktur Sekolah

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Rektor President University Ermayya Suradinata, pakar tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Handyo Laksono, peneliti senior Institute for Global Justice Salamuddin Daeng, dan pakar tata negara Universitas Negeri Malang Suko Wijono, secara terpisah, Jumat (6/5) dan Sabtu (7/5).

Menurut Azyumardi, kaji ulang terhadap empat kali amendemen UUD 1945 perlu dilakukan.

Ke halaman > 5

SP suarapembaruan.com

Amendemen UUD 1945		
Waktu Perubahan	Pada Pasal yang Diubah	Substansi Perubahan
Perubahan pertama Disahkan: 19 Oktober 1999 Sidang Umum MPR 1999	Perubahan 9 pasal: 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21	Pengisian kekosongan Presiden yang dipandang terlampaui kuat
Perubahan kedua Disahkan: 18 Agustus 2000 Sidang Istimewa MPR 2000	Perubahan 5 bab: 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30A, 30B, 30C, 30D	perintah daerah DPR dan kewenangannya hak azasi manusia lambang negara lagu kebangsaan
Perubahan ketiga Disahkan: 10 November 2001 Sidang Tahunan MPR 2001	Perubahan 3 bab: VIIA, VIII, VIII A Perubahan 22 pasal: 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C	bentuk dan kedudukan negara kewenangan MPR kepresidenan impeachment keuangan negara kekuasaan kehakiman
Perubahan keempat Disahkan: 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan MPR 2002	Perubahan 2 bab: XIII, XIV Perubahan 13 pasal: 2, 5A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, 37	DPD sebagai bagian MPR pangantian presiden pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian mata uang bank sentral pendidikan dan kebudayaan perekonomian nasional kesejahteraan sosial perubahan UUD

Gerakan Islam Radikal Indonesia dari Masa ke Masa Pendidikan dan Lapangan Kerja Menjadi Benteng

[JAKARTA] Perbaikan sistem sosial masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dan perbaikan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja merupakan benteng untuk menangkal berkembangnya paham radikalisme. Sebab, orang yang berpendidikan baik, cenderung bersikap lebih kritis. Sedangkan, orang yang bekerja tidak akan sempat menerima paham radikalisme.

Selain dua hal tersebut, peran negara melalui aparaturnya menjadi pemegang mandat terbesar untuk menangkal radikalisasi. Salah satunya dengan menegakkan hukum secara adil dan bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum.



Ahmad Suaedy

Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun SP, Jumat (6/5) dan Sabtu (7/5), dari Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad



Arie Sujito

Suaedy, guru besar bidang pemikiran Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Qasim Mathar, dosen Universitas Nah-

dhalul Ulama (UNU) Solo, Muhammad Ishom, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Solo, Samsul Bakri, dan pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito.

Menurut Ahmad Suaedy, pendidikan berperan melahirkan generasi yang kritis dan lapangan kerja dapat menciptakan kesibukan positif pada seseorang, sehingga tak ada waktu lagi untuk menerima paham-paham radikal. Indonesia bisa mencontoh Malaysia dan Singapura.

Jaminan keamanan di kedua negara itu bukan semata-mata karena sikap keras pemerintahnya, melainkan mereka berhasil menciptakan la-

pangan pekerjaan untuk masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme penyerapan tenaga kerja bagi generasi muda yang baru lulus SMA maupun perguruan tinggi. "Tujuannya, setelah lulus pikiran mereka tidak kosong. Pengangguran intelektual itu jauh lebih berbahaya," terangnya.

Aksi radikalisme berdalih agama di Indonesia bisa muncul karena faktor alamiah dan buatan. Faktor alamiah bersumber dari pikiran pelaku yang bisa dipicu pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialaminya saat di luar negeri.

Ke halaman > 5
Terkait halaman > 2

Radikalisme Subur Akibat Pembiaran Negara

[JAKARTA] Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan gerakan radikalisme sama sekali tak bermakna bila negara terus melakukan pembiaran terhadap kelompok-kelompok berideologi radikal yang jelas-jelas bertentangan dengan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selama ini negara cenderung takut ilan memberi ruang bagi pertumbuhan kelompok-kelompok radikal.

Karena itu, permintaan Presiden SBY tersebut sebenarnya dikritik dengan langkah konkret membebaskan kelompok-kelompok yang bergerak dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Demikian benang merah pandangan yang dilontarkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua PBNU Masdar F Mas'udi, Rektor Universitas

Paramadina Anies Baswedan, anggota Komisi VIII DPR Said Abdullah, Ketua Umum GP Ansur Nurson Wahid, peneliti Wahid Institute Rumadi, dan Direktur Maarif Institute Fajar Ul Haq. Mereka diminta pendapatnya secara terpisah di Jakarta, Kamis (28/4) dan Jumat (29/4), terkait dengan seruan Presiden SBY untuk menghentikan gerakan radikalisme yang marak belakangan ini.

Syafii Maarif menilai, aksi terorisme dan radikalisme sudah mencerminkan Indonesia dalam keadaan rapuh. Terbentuknya dewan revolusi Islam mengharuskan pemerintah bertindak untuk menegakkan hukum. Namun pada kenyataannya pemerintah masih belum bertindak. "Negara ini seperti kampung tak bertuan," tegasnya.

Tindakan terorisme dan radikalisme, menurut Buya Saipuan Maarif, tidak dilakukan



Syafii Maarif



Masdar F Mas'udi



Anies Baswedan



Nurson Wahid

oleh satu kelompok saja. Karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi setiap tindakan teror dan radikalisme yang menimbulkan ketidaknyamanan rakyat. Pemerintah harus berani menindak pihak mana pun yang mengungus ideologi teror dan radikal. Sebagai langkah pencegahan,

Syafii melihat perlunya sebuah strategi nasional yang melibatkan Menteri Pendidikan Nasional, Polri, TNI, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi.

"Pihak-pihak tersebut harus berkoordinasi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme," ujarnya.

Ia menambahkan, terorisme dan radikalisme tak boleh terus dibiarkan. Selain mengancam rakyat banyak, aksi tersebut juga merusak Islam yang sejati, yakni Islam yang rahmatan lilalamin. Munculnya gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang saat ini melakukan penulisan-pencucian dan pencucian otak di-

sertai pencurian harus dihentikan. Pemerintah harus tegas dan berani bertindak menegakkan konstitusi.

Masdar Mas'ud menambahkan, pemerintah jangan hanya sekedar berwacana, melainkan Presiden harus menangkap orang-orang yang menyebarkan virus-virus anti-NKRI. Penangkapan para pe-

laku radikalisme telah diatur dalam UU terorisme dan KUHAP. "Seluruh aspek harus mengacu keutuhan NKRI dan jangan malah menghambat NKRI," ujarnya.

Anies Baswedan mengatakan, pemerintah seharusnya jangan lembek, dan ragu-ragu, mengambil sikap yang tegas dan keras terhadap radikalisme atau ekstremisme. Kalau ada kejadian dalam bentuk ekstrem langsung ditindak dengan tegas secara hukum, sebab jika dibiarkan akan merambat.

Menurutnya, orang bisa saja bebas memiliki pandangan di negara demokrasi. Tetapi, tidak boleh ekspresif dalam bentuk kekerasan. Dengan kata lain, ide dan gagasan boleh saja tetapi tidak boleh bereser dan ideologi Pancasila.

Pembiaran dari halaman 1

Fajar menyebut ada an oleh negara karena s rakan-gerakan semacam sa terpetakan dan dired al. Ada kelompok-kel berlabel agama yang te strategi sejak Orbs. Ss mereka masih cair dan tal saat sekarang. "T kelompok-kelompok i dus aparat sejak dulu," la mencontohkan, harsnya sudah bisa n rakan NII sebagai aksi makar. "Gerakan NII pi perti negara. Mereka s kan negara dalam negat presiden, menteri hinggg itu bukan subversi," ka Membriaknya kelo pok radikal agama kare tidak mampu melaku tal. Kelompok-kelompj barikan kebebasan ata

Kaji Ulang UUD

[JAKARTA] Penyelenggaraan negara saat ini dinilai sudah jauh dari harapan, bahkan cenderung mencederai cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni mengantar kan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, beradalt, adil dan makmur. Penyebabnya, ada sejumlah pasal hasil amandemen yang tak sesuai dengan mukadimah UUD 1945. Oleh karena itu, hasil amandemen UUD 1945 harus dikaji ulang.

Demikian benang merah pemikiran yang disampaikan pengurus Persatuan Pemawirawan TNI AD (PPAD) saat mengunjungi redaksi *Suara Pembaruan* di Jakarta, Kamis (5/5).

Pengurus PPAD yang datang adalah Ketua Umum

Pengurus Pusat. PPAD Letjen TNI (Purn) Soerjadi, Sekretaris Umum, Mayjen (Purn) Kiki Syahnakri, Mayjen TNI (Purn) Suhardo, Mayjen TNI (Purn) Benny Mandalika, dan Mayjen TNI (Purn) YB Wirawan.

"Menyimak kondisi negara seperti sekarang ini, PPAD sangat prihatin. Kita lihat banyak kebohongan konstitusional. Secara *de facto*, kita pakai UUD 1945, tetapi ternyata pada pelaksanaannya, banyak undang-undang atau aturan di bawahnya yang mengingkari pembakuan UUD 1945. Cita-cita yang terdapat dalam UUD 1945 begitu luput dan suci.



Batang Tubuh Tidak Sesuai Preamble

Sebelum Amandemen	Perubahan	Ketegasan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. (Pasal 1) MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (Pasal 2 Ayat 1)	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (Pasal 2 Ayat 1)	Menperempti kedaulatan rakyat karena MPR merupakan perwakilan dari rakyat. Ideanya tentang utusan golongan yang merupakan utusan kelompok masyarakat seperti suku pedalaman.
MPR menetapkan UUD dan GBHN (Pasal 3)	MPR menetapkan UUD (Pasal 3 Ayat 1)	Tanpa GBHN akan melahirkan kebijakan jangka pendek. Lima tahun sekali arah kebijakan akan berubah-ubah dengan partai/golongan yang berkuasa.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (Pasal 30)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (Pasal 30 Ayat 1)	Terjadi penyimpangan peran warga negara dalam bela negara. "Seharusnya tidak hanya dalam hal pertahanan (bersefat militer) namun juga dalam hal ideologi dan kebudayaan.
Cabang produksi yang penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 (1,2,3)	Kewajiban lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang. (tambahan Ayat 5)	Dalam UU No 25 tahun 2007, suatu negara memberikan kewenangan Hak Guna (Buka) asing hingga 95 tahun, dengan modal mencapai 95%.

Foto: SP/UTHER ULAL, Grafik: ANTON

gerakan radikalisme itu sangat praktis mencari kelemahan-kelemahannya apa saja yang bisa dimusnah. Mereka sham betul bahwa remaja dan mahasiswa sangat strategis untuk menyebarkan opini dengan tujuan mempengaruhi massa. Pemikiran mahasiswa bisa sentrikan opini masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat berpendapat, radikalisme tumbuh subur di tengah masyarakat yang penuh dengan kekecewaan, emarahan, dan minimnya figur teidan. Oleh karena itu, menurutnya, "momena radikalisme bukan semata persoalan pendidikan namun suah menggejala dalam kehidupan masyarakat. "Ketika kemarahan itu eritemu dengan ideologi agama jika akan semakin militan," kata omaruddin.

2-15/12/C-5070/142MAJ/W-12

Gerakan Islam Radikal di Indonesia dari Masa ke Masa Pembiaran oleh Negara Suburkan Radikalisme

[JAKARTA] Gerakan radikal berbalut agama di Indonesia tidak terbentuk dan kemudian tumbuh besar seketika. Ada waktu untuk beranak-pi-kan yang cukup lama dan kemudian muncul ke permukaan. Proses itu perkembangan gerakan itu mungkin terjadi karena adanya pembiaran oleh negara.

Faktor lain seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, pendidikan rendah, serta lemahnya penegakan hukum merupakan faktor ikutan yang mempercepat gerakan radikal berkembang pesat.

Demikian rangkuman pendapat yang ditimpun SP dari pengamat gerakan Islam Fajar Ul Haq, Rektor Universitas Paramadina Anies Bas-

wedan, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edy Suwandi Hamid, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Abdul Moqstih Ghazali, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Mukhadji Effendy secara terpisah baru-baru ini. "Gerakan radikal bukan langsung jadi. Kelompok-kelompok *underground* itu sudah ada dari dulu. Begitu mereka menangkap kecenderungan negara melakukan pembiaran, mereka berani muncul di permukaan. Itulah yang terjadi saat ini," kata Fajar Ul Haq, di Jakarta, Kamis (5/5).



Ratumanantri mengaji di pondok Wali Barokah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kediri pada Jumat, Kamis (5/5) dipanggil menyebarkan sebuah omia Hamid (Dit) terdapat berpedoman pada Pancasila UUD 1945 dari NKRI serta menolak tuduhan miring yang mengkaitkan LDII dengan gerakan NII.

Foto: ANTARA, Grafik: ANTON

Sumber: NII Crisis Center

M.1. - 2 ME1 2011

Posko Anti-NII Dibentuk

PERGURUAN tinggi dan sekolah menengah atas se-Bandung bersatu padu menghadapi Negara Islam Indonesia (NII). Mereka sepakat membentuk Posko Anti-NII Komandemen Wilayah (KW) IX. Posko tersebut berlokasi di Masjid Al Fajr, Jl Cijagra Buahbatu, Bandung, Jawa Barat.

Kesepakatan itu muncul dalam pertemuan di Masjid Al Fajr yang dihadiri Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), mantan anggota NII KW IX, mantan anggota NII 2001, 52 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta perwakilan perguruan tinggi dan pelajar se-Bandung, Sabtu (30/4).

Ketua FUUI Athian Ali menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya posko tersebut antara lain untuk menangani korban aksi cuci otak oleh kelompok NII, mencegah merebaknya ajaran NII, dan menampung mantan anggota NII yang bertobat.



EDITORIAL M.1. 2 ME1 2011

Gerakan NII

TERLALU banyak yang misterius di negeri ini. Salah satu di antaranya soal keberadaan kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

Misterius karena NII sudah eksis sejak Republik ini dipimpin Presiden Soekarno, dan terus dihabisi hingga era Presiden Soeharto, tapi hingga sekarang jejaknya terus ada. Bedanya, NII yang didirikan Kartosoewiryo pada era Bung Karno tidak melakukan aksi menipu dengan modus hipnosis dan cuci otak seperti yang belakangan kembali marak.

Menjadi semakin misterius karena pemerintah seolah menutup mata akan keberadaan kelompok yang jelas-jelas mendeklarasikan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Bukan saja melakukan pembiaran, pemerintah malah terkesan menganggap enteng gerakan NII.

Simaklah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto tentang NII sebanyak dua kali dalam rentang tiga hari. Dalam pernyataan pertama, Menko Polhukam mengatakan bahwa NII belum bisa disebut makar karena baru bersifat mengajak orang untuk mengikuti jalan mereka.

"Kalau hanya mengimbau dan meminta untuk mengikuti Negara Islam Indonesia, kan tidak bisa dikatakan mengganggu kedaulatan negara," kata Djoko. Ia malah meminta agar media tidak membesar-besarkan masalah NII.

Dua hari kemudian, Jumat pekan lalu, Djoko kembali menegaskan pernyataannya bahwa NII belum menjadi ancaman nasional. Dalihnya karena NII belum merupakan gerakan yang

“ Kalau untuk yang sudah nyata-nyata saja pemerintah menganggap bukan gangguan, jangan-jangan memang kacamata pemerintah sudah buram.”

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: mediaIndonesia.com

SUARA PEMBARUAN

Mendiknas: Awasi Ketat NII di Kampus

[JAKARTA] Menteri Pendidikan Nasional (mendiknas) Mohammad Nuh menginstruksikan kepada seluruh kampus untuk mengawasi dan mencegah gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Bentuk pengawasan berupa pendampingan kepada semua kegiatan mahasiswa dengan memperbanyak aktivitas mahasiswa, sehingga tidak ada celah untuk masuknya paham menyimpang.

Hal itu dikatakan Nuh di sela-sela pertemuan rektor dan pimpinan sekolah tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) di Jakarta, Rabu (4/5) malam. Pertemuan pimpinan perguruan tinggi (PT) itu itu dihadiri sekitar 200 pejabat kampus.

Nuh menegaskan pada prinsipnya instruksi atau arahan menteri bertujuan menjaga empat pilar berbangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, Kemdiknas hanya menekankan pengawasan dalam segi akademik, sedangkan pengawasan dari sisi keamanan adalah tanggung jawab polisi atau tentara.

"Yang kami lakukan lebih menekankan kepada preventif, pencegahan. Media yang kami pakai adalah media akademik, keilmuan. Kami tidak akan melakukan pendekatan secara represif fisik, itu tidak mungkin. Sebab, ini adalah masalah ideologi maka harus disandingkan dengan pemikiran pula. Basiatnya adalah akademik," kata Nuh.

Di sisi lain, menurutnya, kampus tidak boleh meremehkan sekecil apa pun ajaran



Mohammad Nuh



Gumilar Rusliwa Somantri

yang menentang empat pilar bangsa. Dia berujar gerakan NII juga jangan sampai memunculkan fobia atau ketakutan kepada Islam.

"Umumnya, karakteristik dasar gerakan ini eksklusif, bergabung dengan kelompoknya sendiri saja. Di UGM (Universitas Gadjah Mada) ada empat yang terjerat, sedangkan di ITB (Institut Teknologi Bandung) ada dua orang, tetapi satu sudah kembali ke jalan benar," kata Nuh.

Ketua Majelis Rektor PTN Musliar Kasim membacakan dua deklarasi yang mengatasnamakan pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) dan koordinator koordinasi PT swasta di Indonesia. Deklarasi pertama berisi kesepakatan untuk mengawal perwujudan empat pilar kebangsaan, sedangkan deklarasi kedua berisi seruan anti-mencoret dan anti-plagiat.

"Kami bertekad untuk mengawal empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia," kata Musliar yang juga rektor Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Intelijen Proaktif

Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan langkah preventif, tetapi juga langkah proaktif berupa penegakkan hukum. Dia menyatakan intelijen seharusnya bisa mencari bukti-bukti hukum dan menelusuri jaringan NII.

Terkait wacana intelijen mengawasi kampus, dia mengaku setuju sejauh untuk

mencari bukti-bukti kasus NII. "Harus ada langkah yg lebih proaktif yaitu penegakan hukum, maka harus ada bukti. Bukti ini harus dicari oleh intelijen, ditelusuri jaringannya. Korban-korban sebenarnya bisa ditelusuri, siapa merekrut siapa. Kalau bukti-bukti cukup dan jaringan bisa dibongkar, ajukan ke pengadilan, jangan diberi ruang. Kita ini negara hukum," kata Gumilar.

Marak di UI

Gumilar menyatakan kasus NII sudah marak di UI sejak lima tahun lalu. Sejak saat itu, UI sudah bersikap waspada dengan melakukan konsolidasi antara direktur kemahasiswaan dengan unit-unit kegiatan mahasiswa dan kelompok-kelompok pengajian.

"Biasanya anak-anak yang direkrut NII langsung jatuh prestasinya. Dampak metoda yang dilakukan NII sangat sadis, sangat kejam kepada orang-orang. Anak diecui otak, dilipnotis, melakukan kriminalitas, lupa dengan ibu atau bapak, menganggap semua orang kafir, sampai dia menerima doktrin bahwa mencuri itu halal sepanjang dananya dipakai untuk membangun negara Islam," katanya.

Rektor UGM Sudjarwadi mengatakan mahasiswa perlu memahami Tri Darma Perguruan Tinggi. Di pihak lain, ujarnya, kampus harus menjadi orang tua kedua bagi para mahasiswa, sehingga anak tidak merasa sendirian namun menikmati kehangatan komunikasi. [C-5]

Pancasila Modal Hadapi Radikalisasi

MALANG, KOMPAS – Pancasila tetap merupakan modal terpenting menghadapi serbuan Islam transnasional seperti dikampanyekan Osama bin Laden dan pengikutnya yang sangat mengancam keutuhan bangsa. Ancaman meliputi ancaman fisik hingga peledakan bom dan kerusakan generasi muda akibat radikalisasi. Pancasila relevan sebagai modal sosial, moral, ideologi, dan historis, tetapi untuk digunakan perlu dibersihkan dari sejarahnya yang pernah dimanfaatkan untuk melanggengkan keotoriteran Orde Baru dan Soeharto.

Demikian penilaian pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang (Jawa Timur), Dr Bazri Zain, dan rohaniwan Katolik, Romo Benny Susetyo, Jumat (6/5). Keduanya dihubungi terpisah.

"Pancasila adalah sumber terdekat yang mempersatukan

bangsa ini dalam sejarahnya dan mestinya itu dijadikan pegangan kembali ketika pemerintah dan negara gagal menyejahterakan warganya, lalu warga berpaling kepada ide-ide abstrak yang tampak lebih menarik, seperti gagasan yang dibawa Islam transnasional," kata Bazri.

Salah satu bentuk jelas dari gagasan abstrak itu antara lain terbentuknya aturan pemerintah berbasis syariat di Aceh. "Itu jelas konsep yang abstrak meski mungkin pernah dipakai di zaman Abad Pertengahan. Bagaimana bisa di zaman seperti ini orang dihukum dengan cambuk. Apakah hukuman cambuk menyelesaikan masalah? Gagasan abstrak yang mendapat legitimasi ideal berbasis keagamaan inilah yang kemudian dikonsumsi, di antaranya jadi alat *bargain* politik saat Pemilu 2004 dan akhirnya benar-benar membelenggu penduduk Aceh," kata

Bazri.

Kegagalan negara melindungi dan mempertahankan keutuhan bangsanya melalui konsep ideologi ini kembali mendapati tantangan oleh tawaran ideal Islam transnasional yang masih membawa ide Islam dan gagasan kenegaraan Islam zaman abad ke-13. "Pancasila tetap merupakan ide yang bisa mengikat bangsa ini," katanya.

Benny Susetyo menjelaskan, kekerasan pernah bersekutu dengan agama sejak awal sejarahnya.

"Berbagai literatur menyebut penggunaan kekerasan itu dilakukan tidak untuk agama, melainkan untuk politik kekuasaan. Pancasila mestinya dapat ditampilkan kembali oleh pemerintah dan penyelenggara kekuasaan sebagai cara menjawab krisis ideologi ini demi menyelamatkan generasi muda," kata Benny yang berasal dari Malang. (ODY)

Kembali ke Cita-cita Awal

Keprihatinan terhadap kondisi bangsa tak henti-hentinya disuarakan orang. Banyak kalangan yang melihat bahwa penyelenggaraan negara saat ini sudah jauh melenceng dari apa yang diamanatkan para pendiri negara (*founding fathers*). Cita-cita awal kemerdekaan, yakni mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, makin jauh dari jangkauan.

Kendati telah lebih dari 66 tahun merdeka, masih banyak orang hingga kini merasa belum merdeka, terutama merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Di usia yang beranjak uzur ini, masalah persatuan dan kesatuan bangsa, kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, keadilan dan kemakmuran bagi rakyat banyak, masih menjadi persoalan sehari-hari.

Era reformasi yang semula sangat diharapkan menjadi pintu gerbang mewujudkan amanat bernegara itu, ternyata malah menjadi awal sebuah ketidakpastian. Semangat mengubah segalanya, telah membawa bangsa ini melupakan cita-cita bersama membentuk sebuah negara bangsa.

Beberapa pihak melihat bahwa akar persoalan dari ketidakpastian itu adalah amandemen UUD 1945 yang mengingkari mukadimahnyanya. Padahal, mukadimah adalah roh dari UUD 1945. Hasilnya, banyak produk undang-undang yang melenceng, bahkan bertentangan dengan cita-cita awal berbangsa dan bernegara. Sebagai dampak ikutannya, perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa makin tidak menentu. Pemerintahan berjalan tanpa arah karena hanya bergantung pada visi dan misi seorang presiden, mafia hukum merajalela, korupsi dari Sabang sampai Merauke, dan perpecahan bangsa akibat pembiaran terhadap radikalisme mengancam di depan mata.

Kondisi karut-marut inilah yang belakangan menjadi keprihatinan sejumlah anak bangsa yang kini berhimpun dalam Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD). "Kita sangat prihatin dengan kondisi negara sekarang ini. Kita melihat banyak kebohongan konstitusional. Secara *de facto*, kita pakai UUD 1945, tetapi ternyata pada pelaksanaannya, banyak undang-undang atau aturan di bawahnya yang mengingkari pembukaan UUD 1945. Cita-cita yang terdapat dalam UUD 1945 begitu luhur dan suci. Namun, antara batang tubuh dan pembukaannya saat ini sudah tidak *nyambung*," tegas Ketua Umum Pengurus Pusat PPAD Letjen TNI (Purn) Soerjadi sa-



Mukadimah dan Batang Tubuh UUD 1945 harus diselaraskan lagi agar bangsa Indonesia bisa kembali ke jalur sesuai cita-cita para pendiri negara

Soerjadi sa-

Mi Panc prest mert syam mard pengg jenja "Pa dikont kinian ngan id membu yang p nesia," Yudi casila si kewarga nilai-ni multikul si berdas juga mer lompok "Panc ngan de member pada mi ajarkan warga n yang jug

Ajaran Pancasila Harus Direvitalisasi

KOMPAS 7 Mei 2011

Tumbuhkan Lagi Kerukunan dan Gotong Royong

JAKARTA, KOMPAS — Pengajaran Pancasila sebagai dasar negara di dunia pendidikan harus direvitalisasi. Pola indoktrinasi dan penafsiran tunggal oleh negara semasa Orde Baru telah mengerdikan Pancasila dan membuatnya ditinggalkan sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.

Demikian desakan sejumlah kalangan, Jumat (6/5), tentang dihapusnya pendidikan Pancasila dari sekolah di semua jenjang pendidikan serta perguruan tinggi. Mereka yang berpendapat, antara lain, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, Direktur Reform Institute Yudi Latif, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Soepandji, anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, serta sejumlah praktisi pendidikan dan pemimpin organisasi massa.

Azyumardi mengatakan, Pancasila yang dulu menjadi mata kuliah wajib sekarang memang tidak diajarkan lagi di perguruan tinggi. Ini berbahaya karena siswa dan mahasiswa tidak lagi me-

Sejumlah Aturan tentang Pancasila

- Tap XX/MPRS/1966 Menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- Tap MPR Nomor 8/1983 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
- Keppres Nomor 10/1979 Tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7).
- Tap MPR Nomor 11/1983 Tentang GBHN, Partai politik dan Golongan Karya harus berasaskan Pancasila.
- UU Nomor 2/1989 Tentang Keormasran, Organisasi kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- UU Nomor 2/1989 Selain jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila.
- Tap MPR No XVIII/MPR/1998 Pencabutan Tap MPR Nomor 11/MPR/1978.
- UU Nomor 2/1999 Tentang Partai Politik, Asas atau ciri aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila.
- Keppres Nomor 27/1999 Pencabutan Keppres Nomor 10/1979.
- Keppres Nomor 85/1999 Pembentukan Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Tugasnya mengkaji dan membudayakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi.
- UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.
- UU Nomor 2/2008 Tentang Partai Politik. Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Sumber: Litbang Kompas

FOTO: KOMPAS/LASTI KURNIA, GRAFIK: NOVAN

ngenal dasar berbangsa dan bernegara. Mahasiswa bisa tergoda pada ideologi lain, seperti liberalisme, kapitalisme, militerisme, komunisme, kekhalfahan, dan ideologi lain, tanpa mengenal Pancasila.

"Padahal, nilai-nilai Pancasila

yang digali dari masyarakat, seperti kerukunan, musyawarah, gotong royong, rela berkorban, dan nilai-nilai luhur lain, terbukti efektif menyatukan bangsa ini," kata Azyumardi.

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

ta Komisi X DPR, Fer- menilai cara penyam- teri Pendidikan Kewar- an yang tidak disertai an akan menimbulkan ri siswa. tr Sekolah Islam Dian Murti Sabarini juga an, guru dan pimpinan arus memberikan ke- "Teori sesempurna dak akan bisa dipahami ta tidak disertai kete- tungkap Sabarini. us Yayasan Sekolah Is- apun Ibu, Sulastomo, an, nilai dan budi pe- upakan sesuatu yang hingga tidak bisa diha-

diimplementasikan mbiasan dengan con- lan keteladanan." tutur

(BIL/ABK/LLUK/ ONG/NDY/BAY/THY)

Lihat Juga Video "Pemerintah Perbaiki Kurikulum Pancasila" di rod.kompas.com/kuriku- lump Pancasila

Tajuk Rencana Eka Prasetya Pancakarsa

Terlepas dari dosa-dosa masa lalu rezim Orde Baru, sesungguhnya ada juga nilai-nilai positif yang diwariskan kepada bangsa ini. Nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, antara lain terangkum dalam Eka Prasetya Pancakarsa (tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak). Butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu tercantum dalam Ketetapan MPR (Tap MPR) II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tetapi, Tap MPR itu kini telah dicabut.

Tak hanya pada masa kepemimpinan Soeharto, presiden pertama RI, Soekarno pun sejak awal menekankan pentingnya *national and character building*. Semua itu lahir dari kesadaran bahwa negara ini didirikan untuk jangka waktu yang sangat panjang dan tidak menjadi negara gagal. Heterogenitas bangsa ini harus bisa dikelola dengan baik agar Indonesia tetap dan terus ada.

Sayangnya, warisan masa lalu itu cenderung mulai dilupakan generasi penerus pascatumbuhnya rezim Orde Baru. Orde reformasi yang melahirkan euforia di berbagai bidang seolah menafikan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, berbagai persoalan kini mendera bangsa. Korupsi merajalela. Kesejahteraan rakyat tak kunjung tercapai. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar. Toleransi kehidupan bermasyarakat pun menjadi barang mahal. Belakangan, rasa aman pun mulai terusik seiring dengan teror bom di berbagai tempat. Semua itu membuktikan ada yang salah di negeri ini.

Bagi kita, semua itu bersumber dari pembanguan bidang pendidikan yang hanya mengutamakan bidang akademis, tetapi mengabaikan pendidikan akhlak dan moral. Pada masa lalu ada pelajaran budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Semua itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik, yang tak hanya dihayati, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah semua pelajaran itu dihapus dari kurikulum, kini mulai muncul sebuah generasi yang mengabaikan pluralitas. Bahkan, di tengah kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, generasi yang pernah mendapat pelajaran pendidikan moral Pancasila, juga tak luput dari indoktrinasi nilai-nilai yang mengabaikan keindonesiaan. Tak heran bila belakangan, banyak anak muda yang terlibat teror bom bahkan menjadi pelaku bom

Kembali kepada bukunya Pak Yudi Latif.

Melalui pendekatan dan pengkajian ditinjau dari "Perspektif Historis , diuji dengan Perspektif Teoritis – Komparatif saya setuju dengan pendapat Penulis bahwa :

Para Pendiri Bangsa telah mewariskan visi yang berjangkauan jauh ke depan , bagaimana nasionalisme Indonesia bisa mengantisipasi dinamika perkembangan global. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab , apabila digali , merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan internal dan global , serta bagaimana menyikapi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan nasional maupun global.

Apabila kita semua telah menyadari bahwa sesuatu yang hilang tadi adalah ROH Pancasila , nampaknya tidak ada pilihan lain selain mengkaji ulang Pancasila dan UUD 1945 , mukadimah dan batang tubuhnya konsisten nyambung ke jalur yang sesuai dengan cita-cita dan kehendak para Pendiri Bangsa.

Dekap lagi dengan erat , Pancasila "ratna mutu manikam" yang telah ditemukan kembali oleh Para Pendiri Bangsa agar selalu menjadi dasar arah dan tuntunan Bangsa mencapai masyarakat adil makmur yang dicita-citakan.

Apabila masalah Pancasila semasa ORBA dianggap dilakukan secara represif dan dogmatis sehingga memiliki stigma dimata masyarakat , maka Penulis membahas pada setiap bagian akhir dari sila-silanya dengan uraian “membumikannya:

Ada yang mengatakan Re-vitalisasi , saya sependapat dengan Penulis yang mengatakan Radikalisasi Pancasila untuk De-radikalisasi pemikiran-pemikiran lain yang menyimpang.

Mengutip pendapat Notonegoro bahwa : “Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada ketaatan dari warga negaranya dan keteladanan dari para penyelenggaraan negara”. Sedangkan usaha untuk membumikan Pancasila diurai dalam 6 fitrah (semangat asal) , yakni :

1. Fitrah semangat “menuhan” (Takwa)
2. Fitrah Kekeluargaan
3. Fitrah Keikhlasan dan ketulusan
4. Fitrah semangat pengabdian dan tanggungjawab
5. Fitrah untuk “menghasilkan yang terbaik”
6. Fitrah semangat keadilan dan kemanusiaan
7. Fitrah semangat kejuangan

Sebagai penutup saya juga ingin mengutip pendapat Mohandas K. Gandhi , Tentang adanya ancaman “tujuh dosa sosial” , yakni :

1. Politik tanpa prinsip
2. Kekayaan tanpa kerja keras
3. Perniagaan tanpa moralitas
4. Kesenangan tanpa nurani
5. Pendidikan tanpa karakter
6. Sains tanpa humanitas
7. Peribadatan tanpa pengorbanan

Kita bisa saja mengatakan bahwa yang diperbuat belum separah “tujuh dosa sosial” , tapi tanpa kesadaran untuk pelurusan kembali , gejala ke arah sana sudah terlihat. Marilah kita “gapai” kembali pusaka Pancasila , buku ini akan lebih meyakinkan kita betapa tak terhingga nilainya ; setelah dibagi proses penggaliannya , diyakini keabsahan dan validitasnya , diuraikan pula bagaimana membumikannya. Secara khusus saya ucapkan selamat dan salut atas karyanya menemukan kembali nilai-nilai yang nyaris hilang tidak hanya mampu menyadarkan kita namun juga cukup rinci untuk kita anut dan ikuti.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua , dalam pengabdian kita sebagai satu kesatuan yang utuh dan mantap menuju cita-cita nasional : Masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terima kasih.

Wasssalam,

Jakarta , 19 Mei 2011

TEDDY RUSDY